

## SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

## KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor: 1419/1.851.4

### Tentang

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

## KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

#### Membaca

Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis/ Kelompok Bermain dari Tn/Ny. Dra. Ida Rosyidah Selaku Pemimpin/ Penanggung Jawab BKB Paud Bina Bangsa Nomor : 16/-1.851.3 Tanggal 3 Februari 2014 serta lampiranlampirannya.

## Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan : Makasar dan Penilik PNFI Kecamatan makasar Tanggal 24 Maret 2014.
- b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

- 12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.
- 13. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang susunan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nopmor: 1499/-1.851.31 tanggal 30 Maret 2009, tentang ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan POS PAUD PNFI.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberi izin Pendidikan Anak Usia Dini , Kepada :

Nama Lembaga : BKB PAUD BINA BANGSA

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sekejenis/ BKB Paud A l a m a t : Jl. Sutomo II, Komp. Perindustrian Rt 07/06

Telp. 085216213077

Kelurahan : Kebon Pala
Kecamatan : Makasar
Kota Administrasi : Jakarta Timur
Pemilik/Penyelenggara : yayasan Bina Bangsa
Penanggung Jawab : Dra. Ida Rosyidah
Tahap : izin Prinsip

Kedua

Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku Tanggal

24 Maret 2014 sampai dengan 24 Maret 2015.

Ketiga

Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Paud Sejenis/ Kelompok Bermain, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.;

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 14 Maret 2014

Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur

H. Budiana, M.M NIP-196112161982021003

# T4embusan:

- 1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
- 2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
- 6. Kasi Dikmen Kecamatan Makasar